



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIIK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PADA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG MOTAIN, WINI, DAN
MOTAMASIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA RENCANA POLA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN MOTAMASIN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA RENCANA POLA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN MOTAMASIN**

KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 5.000
Sistem Grid : Geografis
Datum Horisontal : WGS 84

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH-1 Rimba Kota

RTH-2 Taman Kota

RTH-7 Pemakaman

Zona Badan Air

BA Badan Air

ZONA BUDI DAYA

Zona Pos Lintas Batas Negara

PLBN Pos Lintas Batas Negara

Zona Perumahan

R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

R-5 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran

KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU-1 SPU Skala Kota

SPU-2 SPU Skala Kecamatan

SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Kawasan Peruntukan Industri

KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pengelolaan Persampahan

PP Pengelolaan Persampahan

Zona Pariwisata

W Pariwisata

Zona Pertahanan dan Keamanan

HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Transportasi

TR Transportasi

Zona Campuran

C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Pertanian

P-1 Tanaman Pangan

P-3 Perkebunan

Zona Badan Jalan

BJ Badan Jalan






**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA POLA RUANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
MOTAMASIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETERANGAN GAMBAR**




SKALA 1 : 5.000

Sistem Grid : Geografis
Datum Horizontal : WGS 84

BATAS ADMINISTRASI

-  Batas Negara
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

BATAS WILAYAH PERENCANAAN

-  Batas Wilayah Perencanaan
-  Batas Sub-Wilayah Perencanaan
-  Batas Blok

SUMBER PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Tahun 2013-2015 dan Survei Lapangan 2017, Badan Informasi Geospasial.
- Batas Negara RI-RDTL Tahun 2017.
- Delineasi WP : Analisis Perencanaan Tahun 2017.
- Kawasan Hutan berdasarkan Kepmen LHK No. SK.8105/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018.

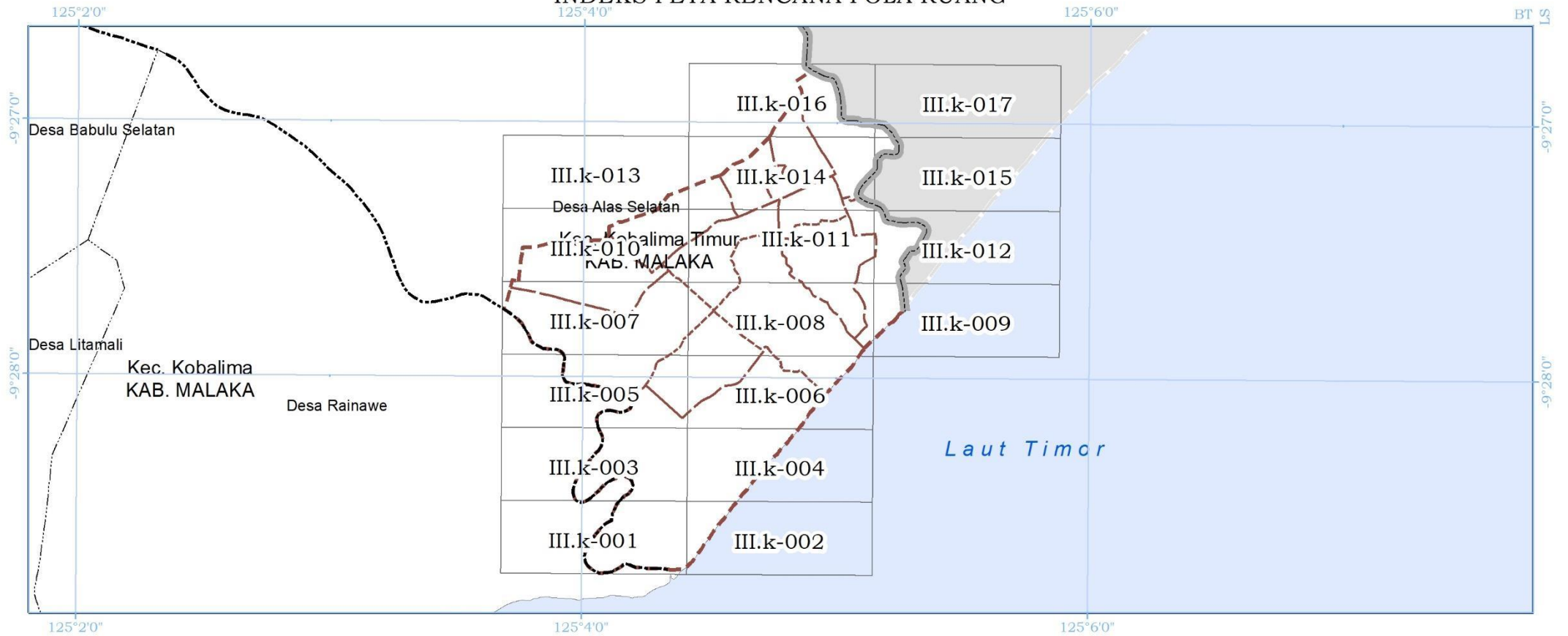
KETERANGAN PETA :

- Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perbatasan ini digambarkan dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi Nasional.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

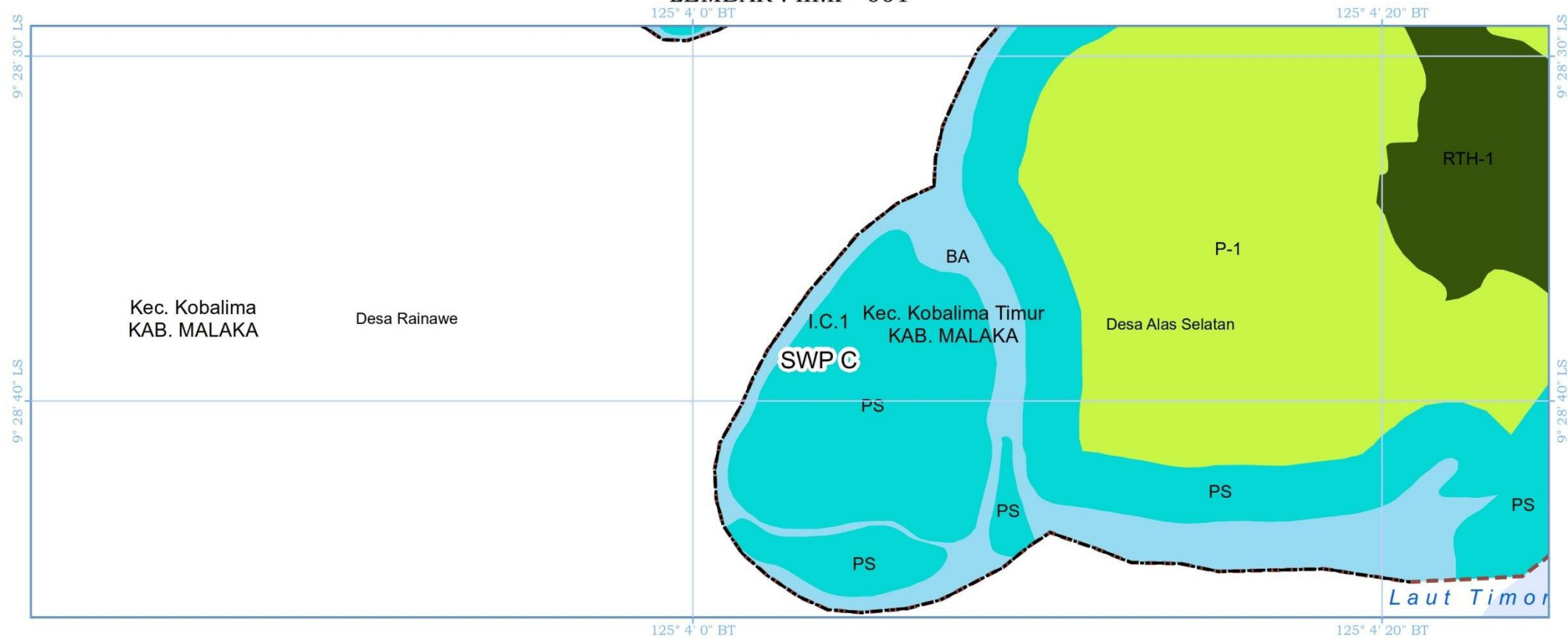
INDEKS PETA RENCANA POLA RUANG





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

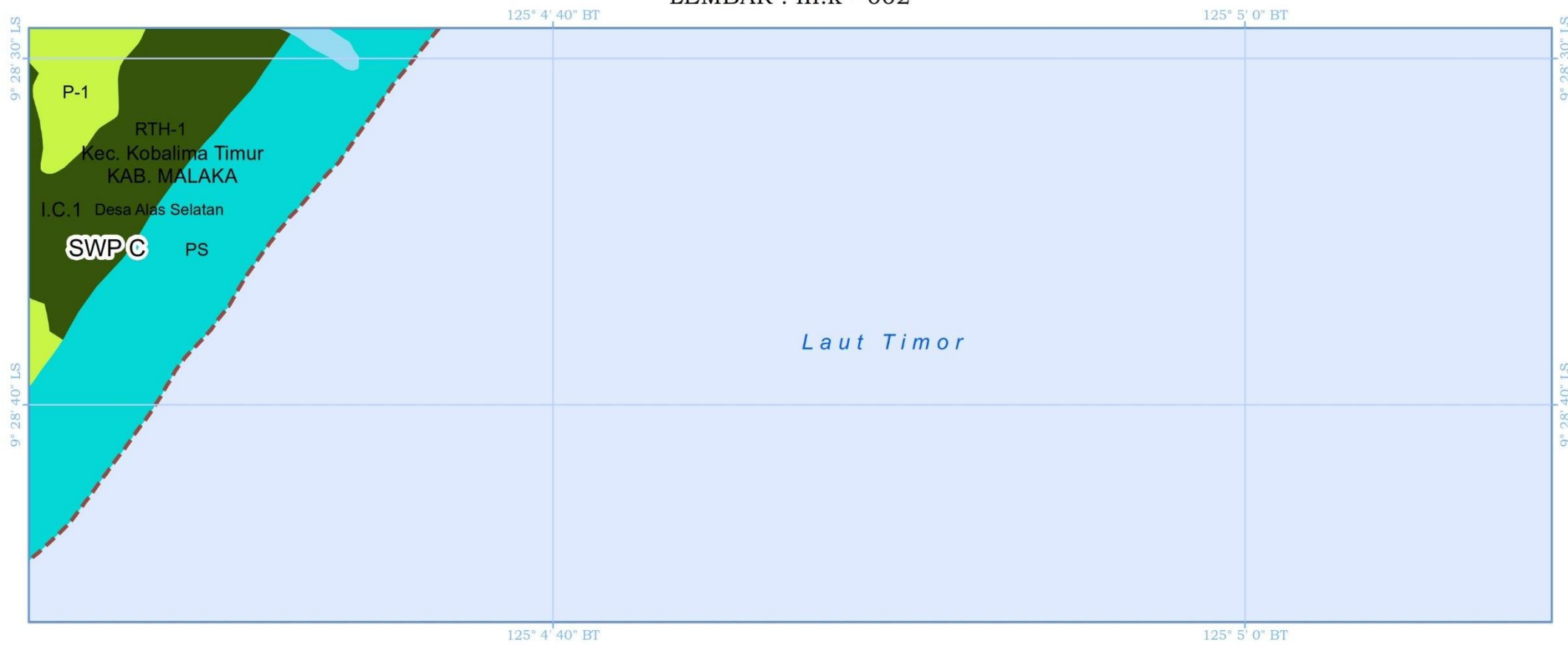
LEMBAR : III.k - 001





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

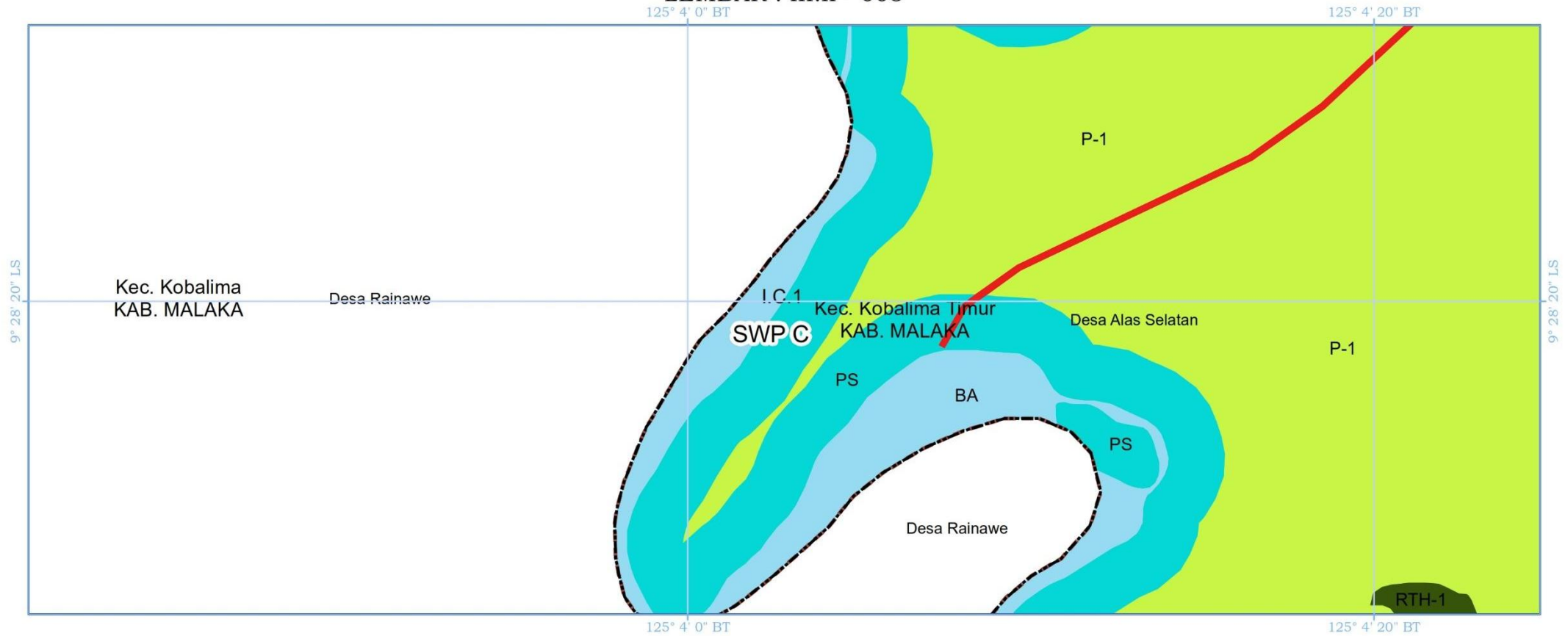
LEMBAR : III.k - 002





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

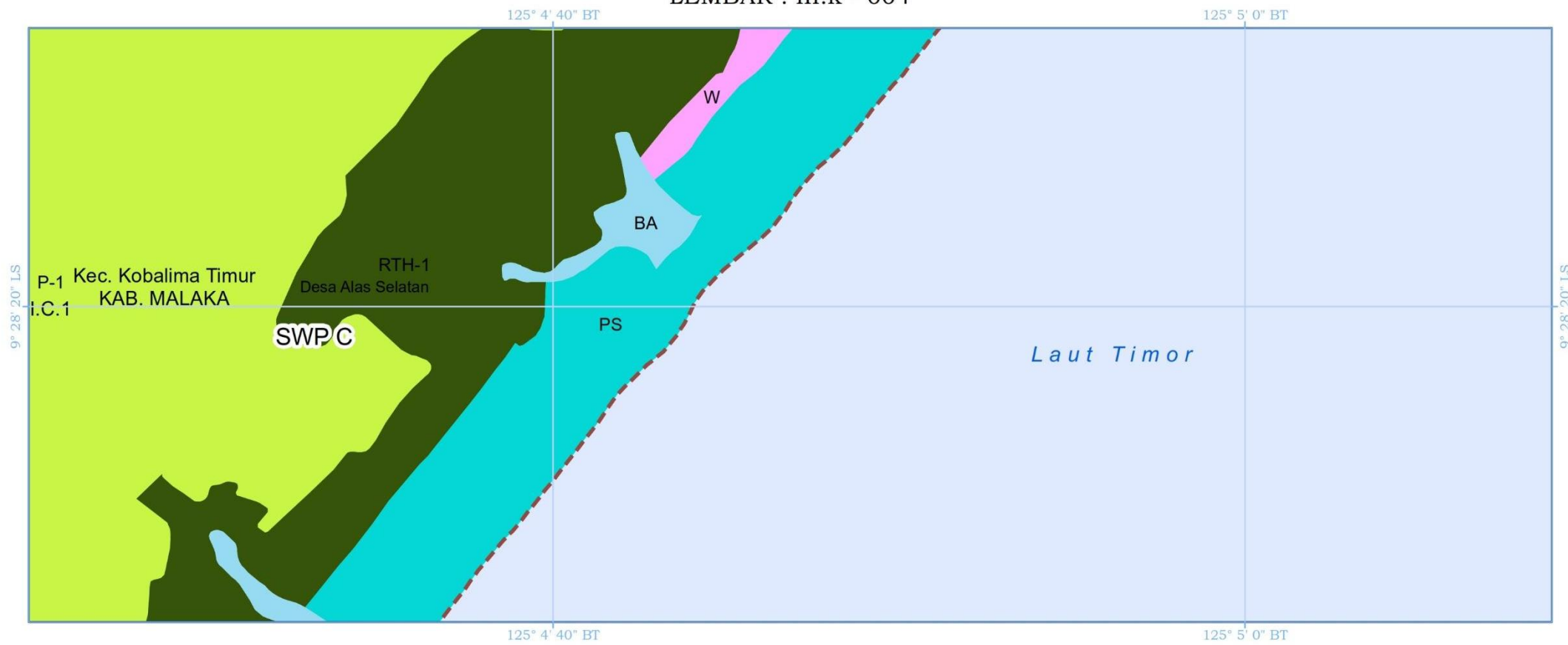
LEMBAR : III.k - 003





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

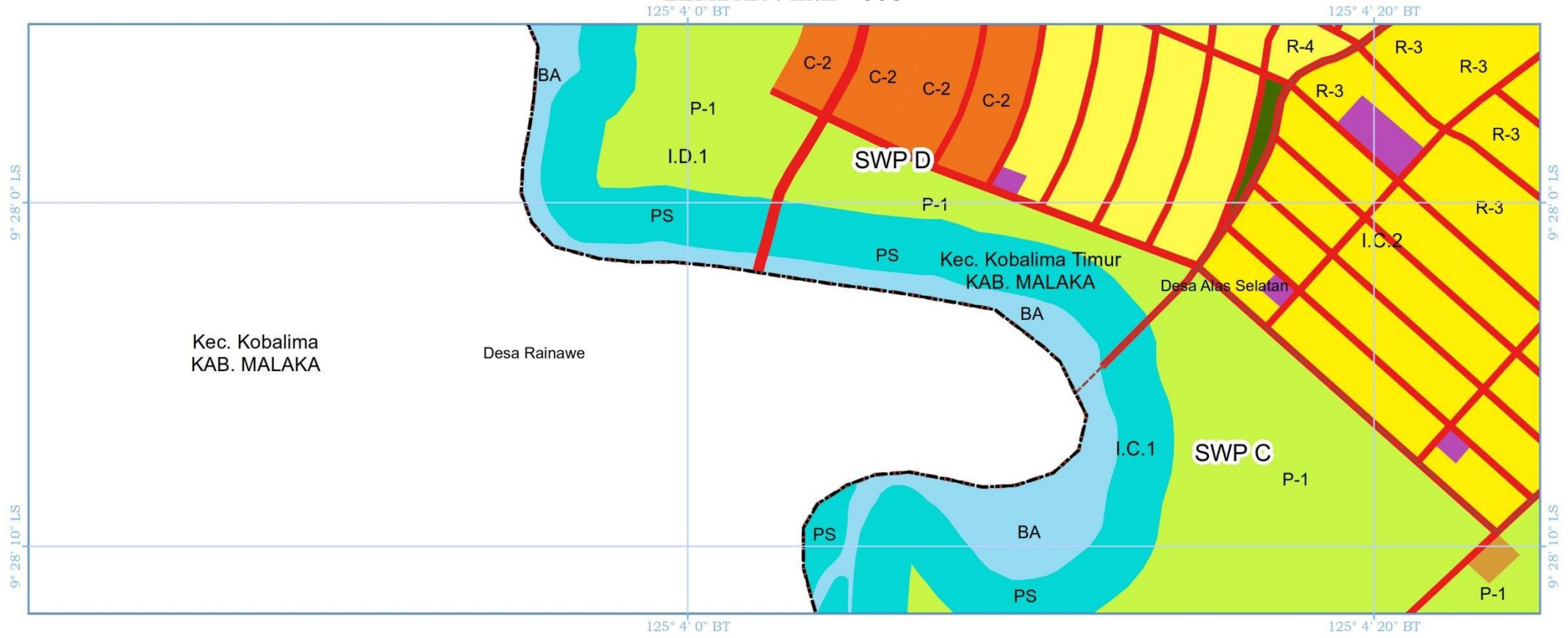
LEMBAR : III.k - 004





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

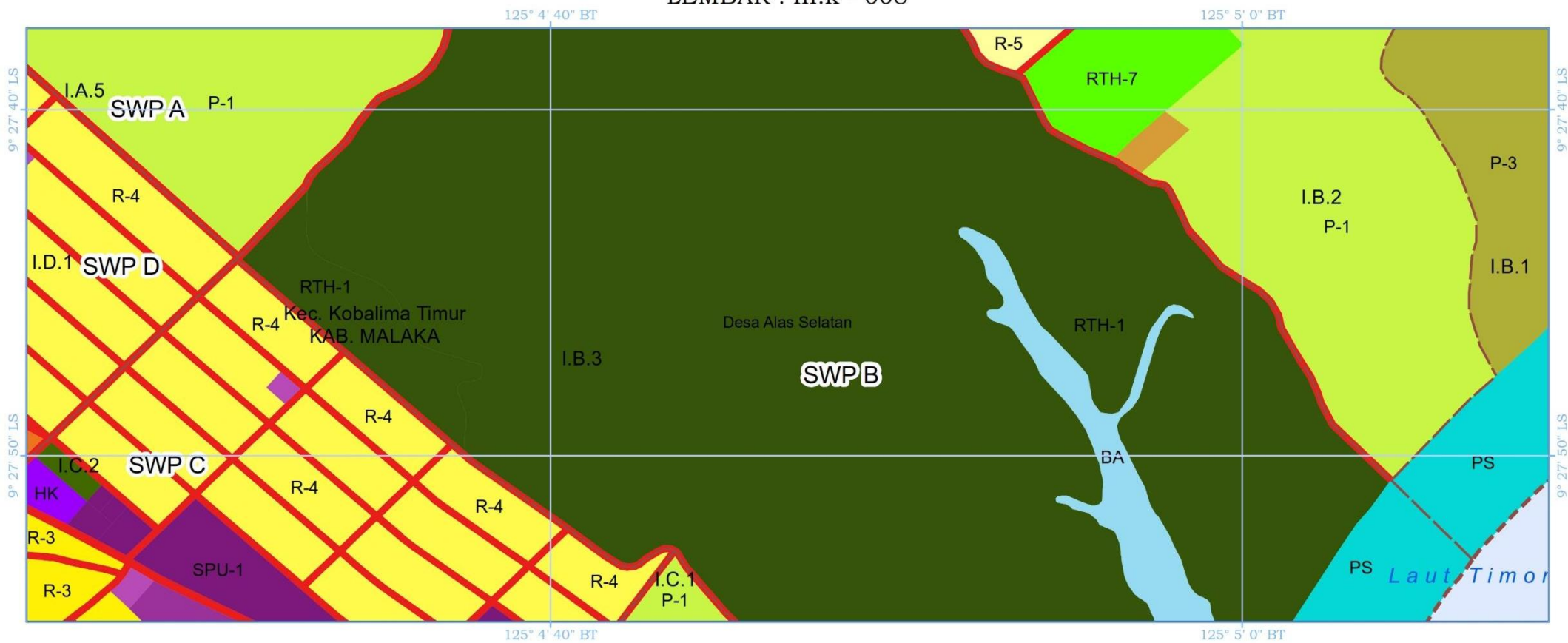
LEMBAR : III.k - 005





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR : III.k - 008





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

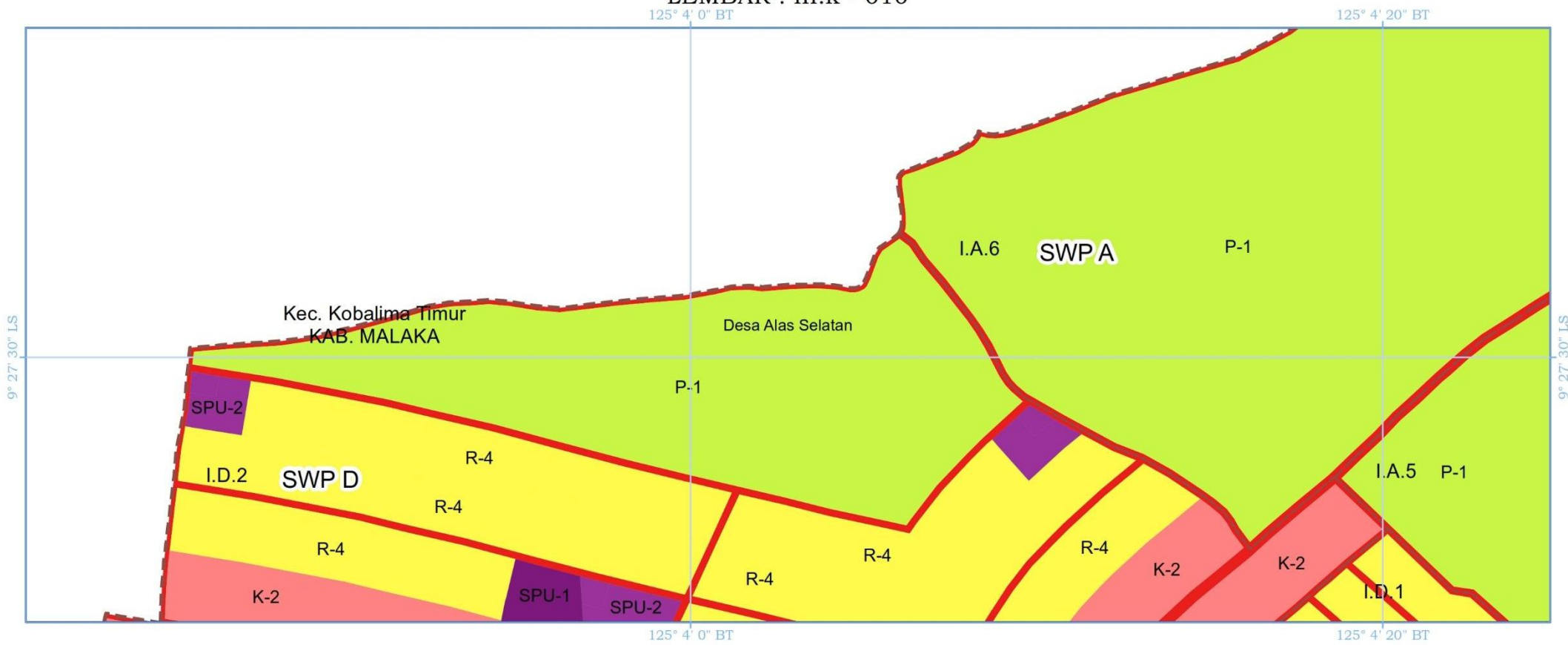
LEMBAR : III.k - 009





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

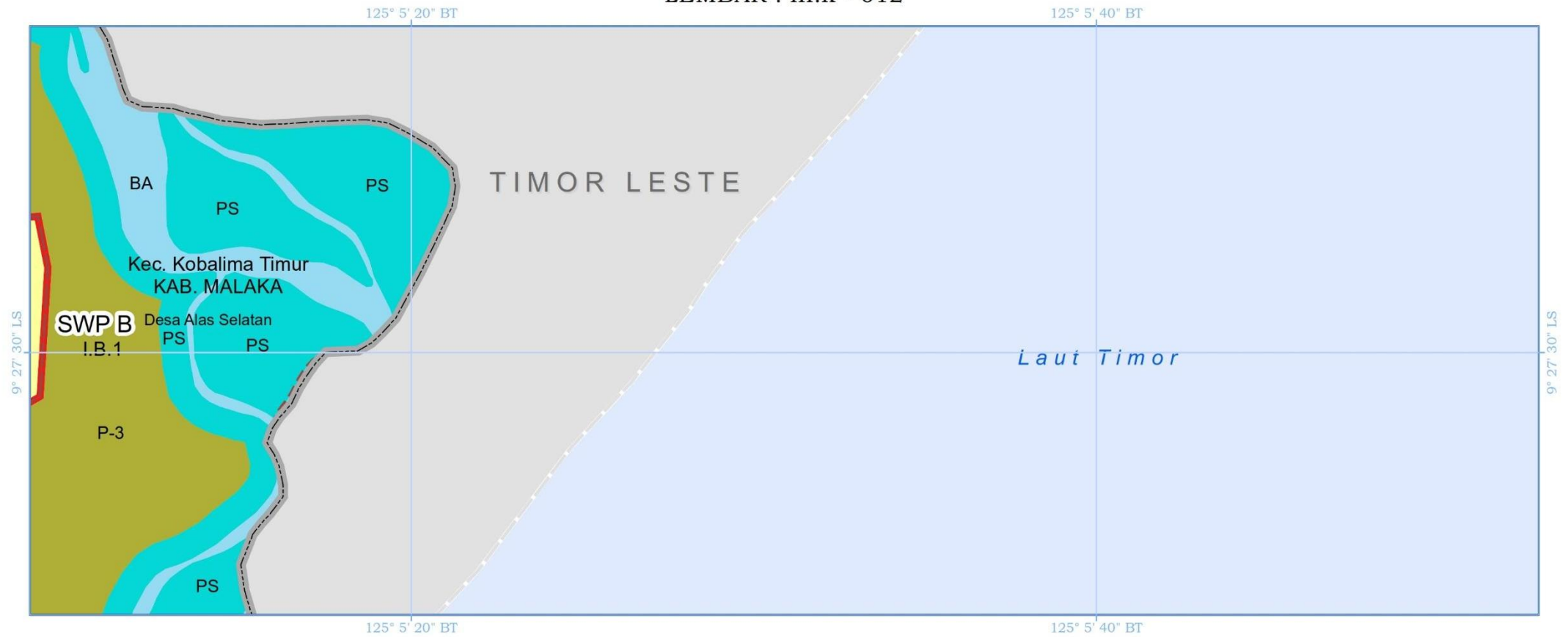
LEMBAR : III.k - 010





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR : III.k - 012





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

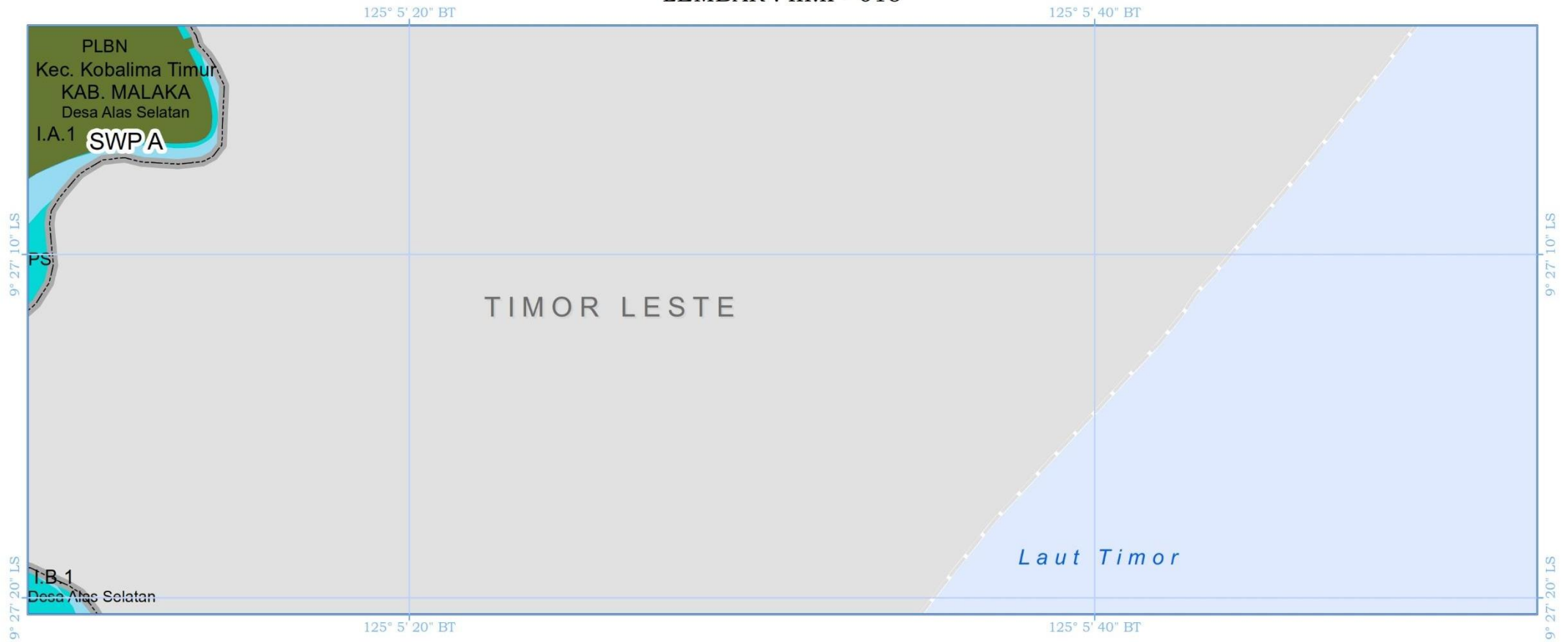
LEMBAR : III.k - 013





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

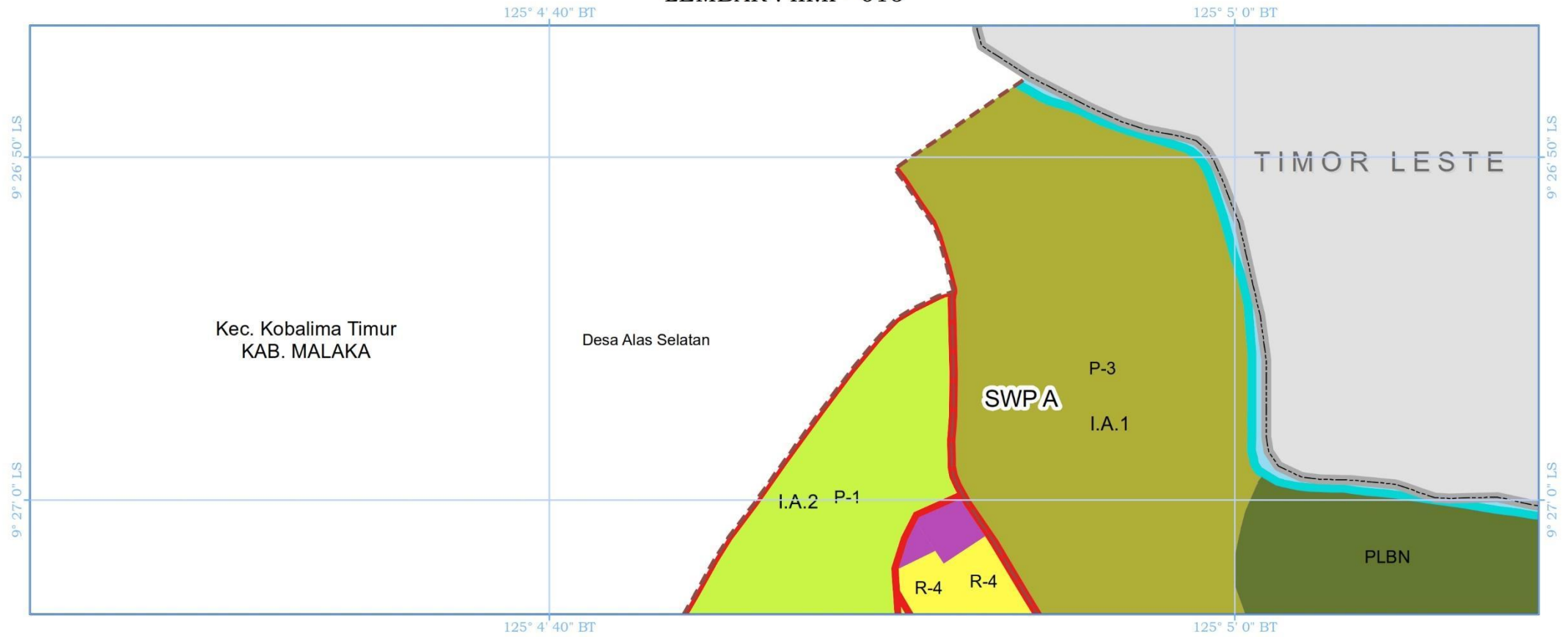
LEMBAR : III.k - 015





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR : III.k - 016





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

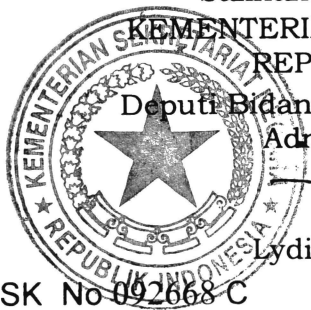
LEMBAR : III.k - 017



Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum, -



Lydia Silvanna Djaman

SK No 092668 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO